

SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN *E-FILING* DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK STATUS PEGAWAI/KARYAWAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

ILHAM BUDI KURNIAWAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN *E-FILING* DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK STATUS PEGAWAI/KARYAWAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ILHAM BUDI KURNIAWAN
A31115710**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN *E-FILING* DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK STATUS PEGAWAI/KARYAWAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

ILHAM BUDI KURNIAWAN
A31115710

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 22 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196604051992032003



Drs. Muh. Nur Aziz, M.M.
NIP 196012311988111004



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196509251990022001

SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN *E-FILING* DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK STATUS PEGAWAI/KARYAWAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

ILHAM BUDI KURNIAWAN
A31115710

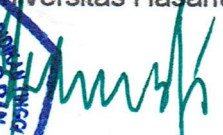
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **24 November 2016** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1 ... 
2.	Drs. Muh. Nur Azis, M.M.	Sekretaris	2 ... 
3.	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA	Anggota	3 ... 
4.	Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP, CA	Anggota	4 ... 
5.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	5 ... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196509251990022001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Ilham Budi Kurniawan
NIM : A31115710
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Analisis Penggunaan *E-Filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak Status
Pegawai/Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar
Selatan**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,



Ilham Budi Kurniawan

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, dan Bapak Drs. Muh. Nur Aziz, M.M., sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan Ibu dan Bapak dengan sebaik-baik pembalasan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan atas perkenannya menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini. Terakhir, ucapan terima kasih kepada bapak, ibu, saudara, dan teman-teman peneliti atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 22 Oktober 2016

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Penggunaan *E-Filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Analysis of Using E-Filing and Employee Taxpayer Compliance in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Ilham Budi Kurniawan
Andi Kusumawati
Muh. Nur Aziz

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *E-Filing* dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak status pegawai/karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Data yang digunakan yaitu data primer yang dikumpulkan melalui wawancara kepada pegawai pajak dan data sekunder berupa jumlah wajib pajak status pegawai/karyawan dan jumlah SPT yang dilaporkan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan jenis penelitian ini yaitu studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah SPT yang diterima sebelum (2011-2012) dan sesudah *E-Filing* diterapkan (2013-2015) yang dibandingkan dengan wajib pajak status pegawai/karyawan terdaftar tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan, namun menurut analisis data primer menunjukkan bahwa *E-Filing* mempunyai dampak terhadap kepatuhan wajib pajak status pegawai/karyawan untuk melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Kata kunci: *E-filing*, kepatuhan wajib pajak pegawai/karyawan, jumlah wajib pajak pegawai/karyawan, jumlah SPT.

This study aimed to analyze the use of E-Filing and its impact on the compliance of employee taxpayers in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. The data used are primary data collected through interviews to tax officers and secondary data from the number of employee taxpayer and the number of SPT. The approach in this study is qualitative with descriptive analysis and type of this study is a case study. The result from the study shows that the number of SPT between before the E-Filing applied (2011-2012) and after the E-Filing applied (2013-2015) compared with registered employee taxpayer doesn't indicate a significant difference, but according to primary data analysis, it shows that E-Filing has an impact on employee taxpayer compliance to report on their SPT at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Keyword: *E-Filing, employee taxpayer compliance, the number of employee taxpayer, the number of SPT.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	4
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.6 Organisasi/Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Surat Pemberitahuan (SPT)	7
2.1.2 Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Manual	10
2.1.3 Penyampaian Surat Pemberitahuan Melalui <i>E-Filing</i>	15
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Rancangan Penelitian.....	28
3.2 Kehadiran Peneliti.....	28
3.3 Lokasi Penelitian.....	29

3.4 Sumber Data	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data	31
3.7 Pengecekan Validitas Data.....	31
3.8 Tahap-tahap Penelitian.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	33
4.1 Gambaran Umum Penggunaan <i>E-Filing</i>	33
4.2 Dampak Penggunaan <i>E-Filing</i>	39
4.3 Masalah yang Dihadapi dalam Penggunaan <i>E-Filing</i>	41
4.4 Hasil dan Harapan Penggunaan <i>E-Filing</i>	43
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	48
5.3 Keterbatasan Penelitian	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Kriteria SPT Formulir 1770S Lengkap.....	13
2.2 Kriteria SPT Formulir 1770SS Lengkap	15
2.3 Kriteria SPT Formulir 1770S Lengkap yang disampaikan melalui <i>E-Filing</i> ...	19
2.4 Kriteria SPT Formulir 1770SS Lengkap yang disampaikan melalui <i>E-Filing</i> .	21
2.5 Penelitian Terdahulu Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
4.1 Jumlah Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan yang Terdaftar	34
4.2 Target dan Realisasi Penerimaan SPT Tahunan melalui <i>E-Filing</i>	36
4.3 Rekapitulasi Penerimaan SPT melalui <i>E-Filing</i> di KPP Pratama Makassar Selatan	37
4.4 Perbandingan SPT yang Diterima dengan Jumlah Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan yang Terdaftar	38
4.5 Persentase Peningkatan Jumlah SPT 1770S dan 1770SS yang Terkumpul	39
4.6 Jumlah SPT yang Dilaporkan Melalui <i>E-Filing</i>	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
4.1 <i>Standard Operating Procedur</i> (SOP) Pelaporan SPT melalui <i>E-Filing</i> bagi Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Kisi-kisi Wawancara.....	53
2 Biodata	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Besarnya porsi penerimaan pajak dalam Pendapatan Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia menjadikan penerimaan sektor pajak sebagai penerimaan terpenting dibanding Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah. Pada Tahun 2015, APBN menganggarkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.380 Triliun yaitu 76,9% dari total Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2015 dengan target rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax ratio* dalam tahun 2015 sebesar 12,38%. Adapun realisasi *tax ratio* tahun 2015 hanya sebesar 10,88% atau 1,50% di bawah target. Sedangkan untuk tahun 2016, APBN menganggarkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,7 Triliun yaitu 84,9% dari total Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2016 dengan rasio penerimaan negara terhadap PDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016 sebesar 13,11%. Pentingnya sektor pajak tersebut membuat pemerintah akan berusaha untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak tersebut sehingga pemerintah dapat menjalankan roda perekonomian dengan semestinya.

Sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penggalan potensi di sektor perpajakan dan menciptakan kepatuhan Wajib Pajak, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menelurkan berbagai inovasi untuk dapat meraih penerimaan negara sesuai target. Salah satu inovasinya yaitu penerapan *E-Filing* yang mulai diterapkan pada Tahun 2014 untuk pelaporan SPT Tahunan 2013. Penerapan *E-Filing* diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-

29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Elektronik yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://djponline.pajak.go.id>) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Layanan *E-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak hanya melayani penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu wajib pajak yang berstatus pegawai/karyawan. Sebelum *E-Filing* diterapkan, Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan secara manual melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak. TPT tersebut terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk memberikan pelayanan perpajakan. Selain itu, Wajib Pajak juga dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan melalui Pojok Pajak, Mobil Pajak, atau *Drop Box*.

Kelemahan utama penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara manual dapat dilihat dari segi kemudahan Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak fleksibel untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan karena terbatas pada waktu dan tempat. Wajib Pajak hanya dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pada saat jam kerja berlangsung di TPT Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau menunggu adanya Pojok Pajak, Mobil Pajak, atau *Drop Box* yang tidak tersedia di semua tempat. Selain itu, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara manual di TPT Kantor Pelayanan Pajak akan menimbulkan antrean karena pegawai pajak yang terbatas.

Pada dasarnya pelaporan SPT melalui *E-Filing* bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat

membantu pemerintah dalam hal pengadministrasian agar penerimaan pajak terus meningkat dan mendorong Wajib Pajak untuk lebih jujur, patuh, dan konsisten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Masalah kepatuhan pajak juga telah menjadi obyek penelitian dari penelitian terdahulu antara lain:

- a. penelitian “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan *Sunset Policy* Pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II” oleh Arief Himawan Sutanto pada tahun 2013;
- b. penelitian “Pengaruh Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke” oleh Dina Fitri Septarini pada tahun 2013;
- c. penelitian “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga pada tahun 2009.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, peneliti ingin mereplikasi variabel terikat yaitu “Kepatuhan Wajib Pajak” dengan perbedaan variabel bebas yaitu “Penggunaan *E-Filing* dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan” dengan judul penelitian, “Analisis Penggunaan *E-Filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis penggunaan *E-Filing* dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis tersebut dilakukan untuk menjawab pertanyaan, “Apakah penggunaan *E-Filing* mempunyai dampak terhadap kepatuhan wajib pajak status pegawai/karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan *E-Filing* dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak status pegawai/karyawan yang menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penggunaan *E-Filing* dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak status pegawai/karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti lainnya yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan menemukan bukti empiris mengenai dampak penggunaan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak status pegawai/karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Peneliti dapat menarik kesimpulan sehingga dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk perbaikan dalam penerapan kebijakan *E-Filing* tersebut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil data di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Formulir SPT Tahunan yang diteliti hanya formulir 1770S dan 1770SS. Pada penelitian ini “penggunaan *E-Filing* untuk melaporkan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS” merupakan variabel bebas sedangkan “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan” merupakan variabel terikat. Adapun kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal. Peneliti mengambil “pelaporan pajak” sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan wajib pajak, karena dari pelaporan SPT Tahunan dapat menjadi indikator bahwa Wajib Pajak sudah melakukan perhitungan dan pembayaran kewajiban pajaknya.

1.6 Organisasi/Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Pada bab pendahuluan ini pembaca dapat mengetahui konteks atau latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan organisasi/sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka berisi tinjauan terhadap landasan teori yang dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan validitas data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang data yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab III. Uraian ini terdiri atas paparan data yaitu data jumlah SPT Tahunan 1770S dan 1770SS sebelum penggunaan *E-Filing* (2011-2012) dan setelah penggunaan *E-Filing* (2013-2015) dan data hasil wawancara yang dianalisis dengan metode dan prosedur yang ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berupa rekomendasi yang diharapkan memperbaiki penerapan *E-Filing* baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan maupun sistem perpajakan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, mendefinisikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan menurut Diana dan Setiawati (2014:89) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau

mengunduh dari situs www.pajak.go.id. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah dan terjangkau oleh Wajib Pajak (Diana dan Setiawati, 2014:90).

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penandatanganan surat pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (Diana dan Setiawati, 2014:90).

Surat Pemberitahuan dapat disampaikan langsung, dikirimkan melalui pos atau disampaikan secara elektronik. Berikut ketentuan mengenai tanggal penerimaan dan bukti penerimaan Surat Pemberitahuan:

- a. jika Surat Pemberitahuan disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka surat tersebut harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan Wajib Pajak akan mendapatkan bukti penerimaan;
- b. jika Surat Pemberitahuan dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, maka tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos atau dengan cara lain

merupakan bukti penerimaan (asalkan Surat Pemberitahuan telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia, dengan huruf latin, angka arab dan satuan mata uang rupiah, serta Surat Pemberitahuan telah disertai dengan lampiran yang diperlukan).

Terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan yang digunakan dan dapat diuraikan sebagai berikut ini.

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa (Diana dan Setiawati, 2014:91).

Mengingat fungsi surat pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Diana dan Setiawati, 2014:91).

Ragam Surat Pemberitahuan Tahunan yang saat ini dipakai untuk administrasi perpajakan yaitu:

- a. formulir 1770 yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan dari pekerjaan bebas;
- b. formulir 1770S yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu atau lebih pemberi kerja, jadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas;
- c. formulir 1770SS yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan terutang dalam suatu Tahun Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu atau lebih pemberi kerja, dan maksimum penghasilan adalah 60 juta setahun;
- d. formulir 1721 yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26;
- c. formulir 1771 yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak oleh Wajib Pajak Badan (Diana dan Setiawati, 2014:92).

2.1.2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Manual

Sebelum *E-Filing* diberlakukan, Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770S dan 1770SS disampaikan Wajib Pajak secara manual ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak yang dibantu oleh Pegawai Pajak di Seksi Pelayanan. Selain itu, Wajib Pajak juga dapat menyampaikan Surat

Pemberitahuan melalui Pojok Pajak, Mobil Pajak, atau *Drop Box*. Adapun tata acara penyampaian Surat Pemberitahuan secara manual menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu:

- a. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara SPT dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditulis dengan Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, dan status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), serta nomor telepon yang dapat dihubungi dan menyerahkannya kepada Pegawai Pajak Seksi Pelayanan di TPT atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box*;
- b. Pegawai Pajak Seksi Pelayanan/ Pojok Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box* menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP dimana Tempat Pelayanan Terpadu/Pojok Pajak/Mobil Pajak/*Drop Box* tersebut berada, dan langsung memberikan Tanda Terima SPT tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT, untuk selanjutnya diserahkan kepada Wajib Pajak;
- c. KPP yang menerima SPT Wajib Pajak selain yang terdaftar di KPP tersebut, mengirimkan SPT Wajib Pajak ke KPP ditempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat dalam jangka waktu sepuluh hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu tiga hari sejak SPT diterima dengan melampirkan Daftar Nominatif dan membuat Surat Pengiriman SPT per KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
- d. KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu dua bulan setelah SPT diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), kecuali untuk SPT Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan dinyatakan tidak

lengkap, terhadap Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan;

- e. atas permintaan kelengkapan SPT tersebut, paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada Pegawai Pajak Seksi Pelayanan di TPT;
- f. Pegawai Pajak Seksi Pelayanan di TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT yang diminta, selanjutnya mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak;
- g. apabila sampai batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan;
- h. terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman Tanda Terima SPT dan dilanjutkan dengan perekaman detil SPT pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak;
- i. jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat satu bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau tiga bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima lengkap.

Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kriteria SPT Formulir 1770S Lengkap

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir Baku	
1	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770S Induk/Formulir 1770S)	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
2	Lampiran I SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770S-I)	Wajib diisi dan disampaikan apabila WP menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau (-).
3	Lampiran II SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770S-II)	Wajib diisi dan disampaikan jika WP menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
II	Lampiran yang Disyaratkan	
1	Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29)	Hanya wajib disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir 1770S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
2	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2	Wajib disampaikan apabila WP menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
3	Surat Kuasa Khusus	Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh WP sendiri.
4	Surat Keterangan Kematian	Wajib disampaikan apabila WP telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
5	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Wajib disampaikan apabila WP mengisi huruf F.b. Formulir 1770S.
6	Penghitungan Pajak Penghasilan terutang bagi WP kawin pisah harta	Wajib disampaikan apabila WP kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud.
7	Fotokopi tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri (TBPFLN)	Wajib disampaikan apabila terdapat kredit pajak fiskal luar negeri.
III	Lampiran Khusus	
1	Daftar Susunan Keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak	Wajib disampaikan apabila WP mempunyai tanggungan keluarga dan daftar tersebut memuat nama, tanggal lahir, hubungan keluarga dan pekerjaan.
2	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009

Tabel 2.1 menguraikan kriteria lengkap untuk Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770S yang terbagi menjadi Formulir Baku, Lampiran yang Disyaratkan, dan Lampiran Khusus. Adapun untuk Surat Pemberitahuan Tahunan formulir

1770SS, formulir dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kriteria SPT Formulir 1770SS Lengkap

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	Formulir Baku	
1	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/ Pekerjaan Bebas (SPT 1770SS Induk/Formulir 1770SS)	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
II	Lampiran Yang Disyaratkan	
1	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2	Wajib disampaikan apabila WP menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
2	Surat Kuasa Khusus	Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh WP sendiri.
III	Lampiran Khusus	
1	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009

Tabel 2.2 menguraikan kriteria lengkap untuk Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770SS yang terbagi menjadi Formulir Baku, Lampiran yang Disyaratkan, dan Lampiran Khusus.

2.1.3. Penyampaian Surat Pemberitahuan Melalui *E-Filing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Elektronik yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak

(<http://djponline.pajak.go.id>) atau penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Layanan *E-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak hanya melayani penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS. Formulir 1770S digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan dari pekerjaannya dari satu atau lebih pemberi kerja, atau penghasilannya lebih dari Rp 60.000.000 setahun, atau Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan lain. Formulir 1770S ini tidak bisa digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Formulir 1770SS adalah formulir SPT Tahunan yang paling sederhana yang ditujukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan jumlahnya tidak lebih dari Rp 60.000.000 setahun.

Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh secara *E-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak harus memiliki *Electronic Filing Identification Number (E-FIN)*. *E-FIN* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *E-Filing*. Permohonan untuk memperoleh *E-FIN* dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan cara sebagai berikut:

- a. mengisi dan menandatangani formulir permohonan *E-FIN*;
- b. melampirkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar atau Kartu Tanda Penduduk;
- c. menunjukkan surat kuasa khusus bermaterai dan fotokopi identitas wajib pajak dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak;
- d. membawa kartu identitas dari wajib pajak atau kuasanya untuk ditunjukkan kepada petugas pajak.

Setelah memperoleh *E-FIN*, agar wajib pajak dapat memanfaatkan layanan *E-Filing*, wajib pajak harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak harus mendaftarkan diri melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak paling lama tiga puluh hari kalender sejak diterbitkannya *E-FIN*;
- b. pendaftaran dilakukan dengan mengisi form registrasi *E-Filing* pada *website* DJP dan Wajib Pajak diwajibkan untuk mencantumkan alamat surat elektronik (*email address*) dan nomor telepon seluler yang valid dan aktif sebagai sarana untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi, dan Bukti Penerimaan Elektronik pada proses *E-Filing*;
- c. setelah proses registrasi berhasil maka Wajib Pajak akan menerima *email* yang berisi *username*, *password*, dan tautan untuk mengaktifkan akun *E-Filing*;
- d. dengan mengklik tautan atau menyalin *link* tautan dalam *browser* maka akun *E-Filing* sudah diaktifkan dan wajib pajak dapat melakukan *login* untuk masuk dalam akun *E-Filing*.

Cara menyampaikan SPT Tahunan setelah memiliki akun *E-Filing* yaitu:

- a. Wajib Pajak melakukan *login* pada akun *E-Filing* dengan memasukan *username* dan *password* kemudian memilih menu sesuai dengan jenis SPT yang hendak disampaikan;
- b. pemilihan menu tersebut akan mengarahkan wajib pajak kepada aplikasi E-SPT yang sesuai dengan jenis SPT yang dipilih;
- c. Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan secara *online* melalui aplikasi E-SPT dengan memasukan data yang benar, jelas, dan lengkap pada setiap elemen E-SPT;
- d. dalam hal hasil pengisian aplikasi E-SPT menunjukkan status kurang bayar, maka Wajib Pajak harus mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran. NTPN dapat diperoleh Wajib

Pajak setelah melakukan pelunasan atas jumlah pajak yang kurang bayar (PPh Pasal 29);

- e. setelah selesai mengisi E-SPT, Wajib Pajak harus membubuhkan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital sebelum disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak;
- f. tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Wajib Pajak meminta kode verifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui menu yang telah disediakan dalam *website* DJP setelah selesai mengisi E-SPT;
 - 2) kode verifikasi tersebut akan dikirimkan kepada wajib pajak melalui *email* yang telah didaftarkan oleh wajib pajak pada saat registrasi *E-Filing*;
 - 3) Wajib Pajak memilih data SPT, kemudian mengirim E-SPT dengan memilih menu yang tersedia dalam *website*;
 - 4) Wajib Pajak memasukan kode verifikasi yang telah diterima melalui email ke dalam kotak isian yang disediakan pada saat proses pengiriman E-SPT;
- g. Wajib Pajak akan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan dalam hal hasil pengisian E-SPT dinyatakan lengkap;
- h. hasil pengisian aplikasi E-SPT dinyatakan lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi.

E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT, sedangkan *E-Filing* adalah cara penyampaian E-SPT secara *online* dan *real time* melalui internet. Penyampaian SPT melalui *E-Filing* juga harus memenuhi kriteria benar, lengkap,

dan jelas. Adapun Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770S yang disampaikan melalui *E-Filing* dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kriteria SPT Formulir 1770S Lengkap yang disampaikan melalui *E-Filing*

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT <i>E-Filing</i>	
1	Data Digital SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770S Induk/Formulir 1770S)	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
2	Data Digital Lampiran I SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770S – I)	Wajib diisi dan disampaikan apabila WP menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).
3	Data Digital Lampiran II SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770S – II)	Wajib diisi dan disampaikan jika WP menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki; isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Lanjutan Tabel 2.3

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
4	Data digital tentang pembayaran PPh Pasal 29 (Kode NTPN)	Wajib diisi sebagai pengganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29 jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.
II	Lampiran yang Disyaratkan	
1	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2	Wajib disampaikan apabila WP menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
2	Surat Kuasa Khusus	Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh WP sendiri.
3	Surat Keterangan Kematian	Wajib disampaikan apabila WP telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.
4	Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya	Wajib disampaikan apabila WP mengisi huruf F.b. Formulir 1770S.
5	Penghitungan Pajak Penghasilan terutang bagi WP kawin pisah harta	Wajib disampaikan apabila WP kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan melampirkan perjanjian dimaksud.
6	Fotokopi tanda bukti pembayaran fiskal luar negeri (TBPFLN)	Wajib disampaikan apabila terdapat kredit pajak fiskal luar negeri.
III	Lampiran Khusus	
1	Daftar Susunan Keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak	Wajib disampaikan apabila WP mempunyai tanggungan keluarga dan daftar tersebut memuat nama, tanggal lahir, hubungan keluarga dan pekerjaan.
2	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009

Tabel 2.3 menguraikan kriteria lengkap untuk Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770S yang disampaikan melalui *E-Filing*. Kriteria lengkap tersebut terbagi menjadi Formulir Baku, Lampiran yang Disyaratkan, dan Lampiran Khusus. Adapun untuk Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770SS yang disampaikan melalui *E-Filing*, formulir dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kriteria SPT Formulir 1770SS Lengkap yang disampaikan melalui *E-Filing*

No.	Nama/Bentuk Lampiran/Formulir	Keterangan
I	SPT <i>E-Filing</i>	
1	Data Digital SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha /Pekerjaan Bebas (SPT 1770SS Induk/Formulir 1770SS)	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya.
II	Lampiran Yang Disyaratkan	
1	Fotokopi Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2	Wajib disampaikan apabila WP menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
2	Surat Kuasa Khusus	Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak ditandatangani oleh WP sendiri.
III	Lampiran Khusus	
1	Lembar "Data Identitas Wajib Pajak"	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan identitas Wajib Pajak.

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009

Tabel 2.4 menguraikan kriteria lengkap untuk Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770SS yang disampaikan melalui *E-Filing*. Kriteria tersebut terbagi menjadi Formulir Baku, Lampiran yang Disyaratkan, dan Lampiran Khusus.

Secara garis besar, syarat yang harus dilengkapi dalam penyampaian SPT Tahunan melalui *E-Filing* untuk dapat dikategorikan “lengkap” lebih sederhana dibandingkan penyampaian SPT Tahunan secara manual.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”

Nurmantu (2006:148) mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Menurut Widilestariningtyas (2008:69), tentang pengertian kepatuhan yaitu “kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Terdapat dua macam kepatuhan, menurut Widilestariningtyas (2008:70) yaitu:

- a. kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan;
- b. kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

Isnawan (2007:82) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Noran D. Norwak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut (Devano dan Rahayu, 2006:110):

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
- c. menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d. membayar pajak yang terutang dengan benar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir;
- d. dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 28 dan dalam hal terhadap

wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;

- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan pengertian di atas, kepatuhan mengandung unsur sebagai berikut:

- a. adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap obyek pajak;
- b. adanya sikap setuju dari subyek pajak;
- c. adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap yang telah dimilikinya.

Nasucha (2005:45) menjelaskan lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak sebagai berikut.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melibatkan kepatuhan wajib pajak sebagai topik yang dipengaruhi oleh beberapa variabel namun peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang penggunaan *E-Filing* dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak dengan status pegawai/karyawan. Adapun penelitian terdahulu tersebut mengenai kepatuhan wajib pajak diuraikan pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

N o	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
1	Sri Rahayu, Ita Salsalina Lingga (2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Memperoleh gambaran tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan KPP Pratama Bandung “X” dan menelaah bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.	Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Arief Himawan Sutanto (2013)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan <i>Sunset Policy</i> Pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II	Menganalisis pengaruh dari <i>sunset policy</i> terhadap kepatuhan wajib pajak yang diidentifikasi dari peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima dari waktu ke waktu.	Kebijakan <i>Sunset Policy</i> memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.	Kebijakan <i>sunset policy</i> bernilai positif terhadap kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT). Dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal terbukti kebenarannya.

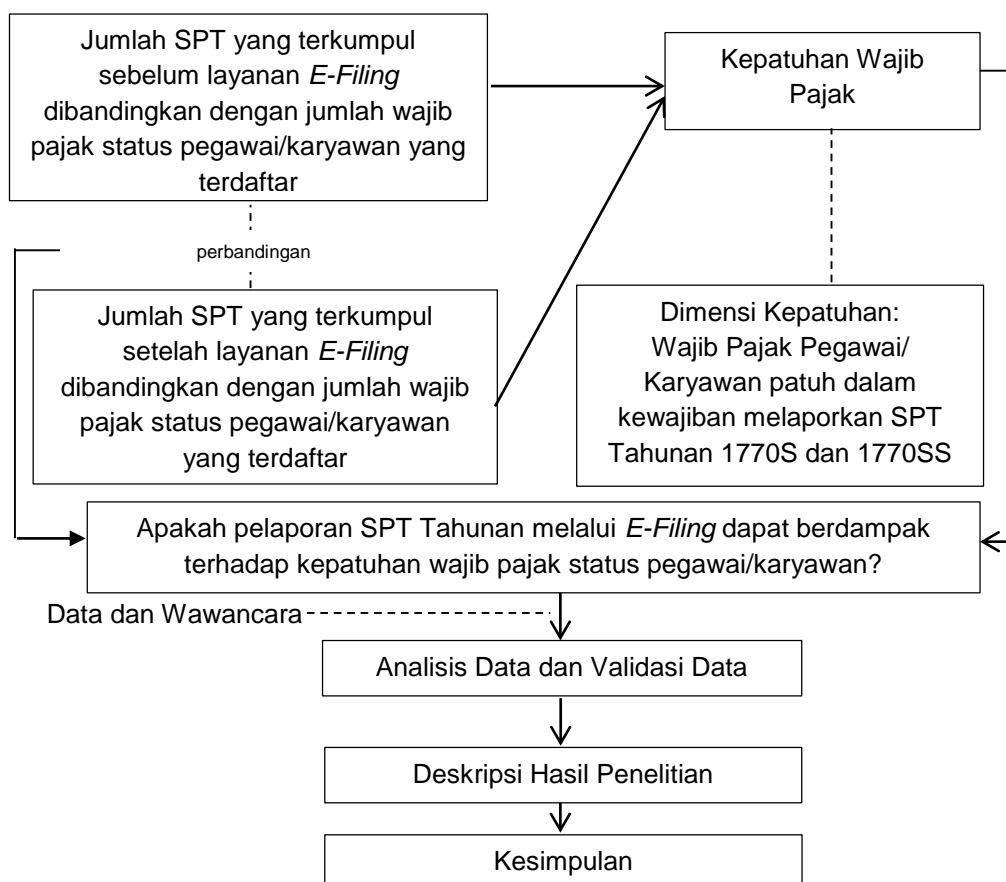
Lanjutan Tabel 2.5

N o	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hipotesis	Hasil Penelitian
3	Dina Fitri Septarini Yohanis Rura, Tawakka I (2013)	Pengaruh Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke	Menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pelayanan dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak, dan pengaruh pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Pelayanan pajak berpenga- ruh positif terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak, namun sanksi pajak berpenga- ruh negatif terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak.	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pelayanan dan sanksi pajak masing- masing berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitian ini juga memperlihat- kan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengukur hubungan antar variabel yaitu membandingkan jumlah SPT yang terkumpul sebelum dan sesudah layanan *E-Filing* diterapkan, jumlah SPT ini akan berbentuk persentase karena dibandingkan juga dengan wajib pajak status pegawai/karyawan yang terdaftar. Hal ini dilakukan karena setiap tahun pasti terdapat jumlah wajib pajak status pegawai/karyawan baru yang terdaftar sehingga perbandingan berupa persentase agar *apple-to-apple*. Semakin banyak SPT yang terkumpul maka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi pula karena dimensi yang diambil dalam kepatuhan pajak pada penelitian ini yaitu wajib pajak patuh melaporkan SPT Tahunan formulir 1770S dan 1770SS. Lebih lanjut kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan melalui Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran berikut ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bagdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2016:4)). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif karena bermaksud untuk mengetahui peningkatan kepatuhan wajib pajak pegawai/karyawan karena pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui *E-Filing* bukan hanya dilihat dari angka-angka, namun juga dari perspektif individu dan organisasi sehingga akan menghasilkan penelitian yang bermanfaat.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian untuk mendapatkan gambaran jelas masalah yang harus diperiksa sesuai dengan situasi yang sebenarnya dari berbagai sudut dan perspektif menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi mengenai obyek spesifik, kejadian, atau aktivitas, seperti unit bisnis tertentu atau organisasi. Dalam studi kasus, kasus adalah individu, kelompok, organisasi, kejadian, atau situasi yang menarik bagi peneliti (Sekaran dan Roger, 2013:103).

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data di lapangan. Instrumen pendukung berupa dokumen-dokumen lainnya dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian. Peran kehadiran peneliti secara langsung di lapangan

sebagai tolok ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan atau sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan diketahui oleh subyek atau informan, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang berlokasi di Jalan Urip Sumohardjo Km. 4 Makassar. Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama melaksanakan tugas pelayanan, salah satunya mengumpulkan SPT dari Wajib Pajak.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara kepada pegawai KPP Pratama Makassar Selatan di Seksi Pelayanan dan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I. Data sekunder yang digunakan adalah berbagai dokumen, yaitu jumlah wajib pajak status pegawai/karyawan yang terdaftar, jumlah SPT Tahunan 1770S dan 1770SS yang dikumpulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sebelum penggunaan *E-Filing* (2011-2012) dan setelah penggunaan *E-Filing* (2013-2015), serta target dan realisasi penerimaan SPT Tahunan melalui *E-Filing*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. wawancara dilakukan kepada pegawai KPP Pratama Makassar Selatan di Seksi Pelayanan dan *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I dengan kisi-kisi wawancara yang tidak terstruktur. Dalam wawancara ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Poin-poin pokok tersebut terdiri dari:
 - 1) penerapan *E-Filing* di KPP Pratama Makassar Selatan dilihat dari peraturan dan praktik;
 - 2) dampak diterapkannya pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui *E-Filing* di KPP Pratama Makassar Selatan bagi pegawai dan Wajib Pajak;
 - 3) masalah yang dihadapi dalam menerapkan *E-Filing* di KPP Pratama Makassar Selatan;
 - 4) fenomena kepatuhan Wajib Pajak yang terjadi dalam penerapan *E-Filing* di KPP Pratama Makassar Selatan.
- b. studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data jumlah SPT yang terkumpul sebelum dan sesudah *E-Filing* diterapkan di KPP Pratama Makassar Selatan.
- c. studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal, dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai acuan dalam pembahasan dan analisis data.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2016:248) bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data merupakan langkah terakhir penelitian sebelum melakukan penarikan suatu kesimpulan.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu bukan hanya membandingkan dan menganalisis hasil dari jumlah SPT Tahunan 1770S dan 1770SS sebelum penggunaan *E-Filing* (2011-2012) dan setelah penggunaan *E-Filing* (2013-2015), namun juga mengumpulkan data melalui wawancara, mereduksi data, disajikan, lalu ditarik kesimpulan.

3.7 Pengecekan Validitas Data

Kredibilitas berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

- b. triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Kredibilitas data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- c. konfirmasi, setelah data didapat dan diolah menjadi sebuah temuan selanjutnya peneliti melakukan konfirmasi kembali kepada sumber data.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat penelitian mencakup observasi lapangan dan permohonan izin kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian;
- b. tahap pekerjaan lapangan, meliputi wawancara dan pengumpulan data jumlah SPT Tahunan 1770S dan 1770SS sebelum penggunaan *E-Filing* (2011-2012) dan setelah penggunaan *E-Filing* (2013-2015). Selanjutnya setelah data diolah, dilakukan konfirmasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan untuk mendapat komentar mengenai fenomena tentang dampak penerapan *E-Filing* di KPP Pratama Makassar Selatan.
- c. tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan dan saran-saran demi kesempurnaan skripsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan menulis skripsi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menurut analisis data sekunder, pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan karena jumlah SPT yang diterima sebelum (2011-2012) dan sesudah *E-Filing* diterapkan (2013-2015) yang dibandingkan dengan Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan terdaftar tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan.
2. Menurut analisis data primer, pelaporan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui *E-Filing* memberikan dampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan untuk melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan yang ditandai dengan antusiasme Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan, meningkatnya penerimaan pajak, dan tercapainya target penerimaan *E-Filing* di KPP Pratama Makassar Selatan. *E-Filing* juga memberikan dampak positif bagi Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan dan Pegawai Pajak walaupun terdapat beberapa masalah antara lain:
 - a. tidak semua Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan mengerti tentang komputer, akses internet, dan *email*;

- b. kurangnya pengetahuan Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan dalam mengisi SPT Tahunan secara *online* sehingga banyak kesalahan dalam pengisian *E-Filing*;
- c. sistem jaringan di *website* <http://djponline.pajak.go.id/> sering *down* akibat terlalu banyaknya *traffic* Wajib Pajak yang mengakses *website* tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diajukan peneliti sebagai hasil dari penelitian dan kesimpulan yaitu agar masalah-masalah yang dihadapi dalam proses penggunaan *E-Filing* dapat segera diatasi, seperti:

1. Pegawai KPP Pratama Makassar Selatan sebaiknya melakukan asistensi kepada Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan yang belum mengerti tentang komputer, akses internet, dan *email* apabila diperlukan;
2. Pegawai KPP Pratama Makassar Selatan sebaiknya melakukan sosialisasi ke berbagai tempat kepada Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan yang kurang paham dalam pengisian SPT Tahunan melalui *E-Filing* untuk meminimalisasi kesalahan;
3. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memperbaiki dan menambah kapasitas *server* agar *website* <http://djponline.pajak.go.id/> tidak mengalami gangguan pada saat *traffic* sedang padat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Kepatuhan Wajib Pajak yang dibahas dalam penelitian ini hanya kepatuhan formal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk membahas juga kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

2. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hanya wawancara kepada pegawai KPP Pratama Makassar Selatan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah sumber data primer yaitu wawancara kepada Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.
3. Obyek penelitian dalam penelitian ini hanya KPP Pratama Makassar Selatan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas obyek penelitian seperti tingkat kantor wilayah maupun tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2014. *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: ANDI.
- Effendi, Sofian. 1989. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Tarsito.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik*. 2016. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, Chaizi. 2005. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Numantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*. 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*. 2014. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 2007. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, (Online), Vol. 1, No. 2, (<http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnalakuntansi/article/viewFile/319/pdf>, diakses tanggal 28 April 2016).
- Sekaran, Uma dan Roger, Bougie. (2013). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, Sixth Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

- Septarini, D.F., Rura, Yohanis dan Tawakkal. 2013. Pengaruh Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke. *Jurnal Analisis*, (Online), Vol. 2, No. 1, (<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/95a90b2bc5e233fd84eccfe3b364adf4.pdf>, diakses tanggal 28 April 2016).
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui E-Filing*. 2015. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
- Sutanto, Arief Himawan. 2013. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan *Sunset Policy* Pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. *Jurnal Akuntansi Unesa*, (Online), Vol. 1, No. 3, (<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/2290>, diakses tanggal 28 April 2016).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 1983. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2007. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Widilestariningtyas, Ony. 2008. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kisi-kisi Wawancara

(sebelum melakukan wawancara, bacakan lembar pendahuluan berikut ini terlebih dahulu)

ANALISIS PENGGUNAAN *E-FILING* DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK STATUS PEGAWAI/KARYAWAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Yth. Bapak dan Ibu Pegawai KPP Pratama Makassar Selatan
Direktorat Jenderal Pajak

Dengan hormat,

Saya adalah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Saat ini sedang mengikuti tugas belajar jenjang Sarjana (S1) Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan dalam tahap pembuatan skripsi dibawah bimbingan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. Muh. Nur Aziz, MM.

Saya memilih pegawai KPP Pratama Makassar Selatan sebagai responden penelitian saya dengan tujuan untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan karena melaporkan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS melalui *E-Filing* di KPP Pratama Makassar Selatan. Saya mengharapkan bantuan Anda untuk memberikan dukungan kepada saya dalam rangka penelitian ini, dengan menjawab pertanyaan dalam wawancara ini.

Semua informasi yang Anda berikan dalam wawancara ini sangat membantu menyelesaikan penelitian akademik saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Anda dalam penelitian ini.

Profil Responden:

Nama :
Jabatan dan Unit Kerja :

Kisi-kisi Pertanyaan

1. a. Bagaimana penerapan *E-filing* di KPP Pratama Makassar Selatan?
b. Apakah terdapat hal-hal di luar SOP yang muncul dalam pelaksanaan?
2. Apa dampak diterapkannya *E-Filing* di KPP Pratama Makassar Selatan bagi pegawai dan Wajib Pajak Status Pegawai/Karyawan?
3. Apa masalah yang dihadapi dalam menerapkan *E-Filing* di KPP Pratama Makassar Selatan?
4. Apakah menurut anda *E-Filing* berhasil memberikan dampak terhadap Wajib Pajak untuk melaporkan SPT-nya? Atau terdapat faktor lain?
5. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan terkait *E-filing* selain dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan?

Lampiran 2: Biodata

BIODATA**Identitas Diri**

Nama : Ilham Budi Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 25 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nomor Telepon : 0817260120
Alamat E-mail : ilhambudik@gmail.com
Alamat Rumah : BTP Blok L Nomor 10 Makassar

Riwayat Pendidikan

1. SD Gentungan II Yogyakarta Tahun 1990-2002;
2. SMP 1 Nglipar Yogyakarta Tahun 2002-2005;
3. SMA 2 Wonosari Yogyakarta Tahun 2005-2008;
4. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta, Program Diploma III Akuntansi Pemerintahan Tahun 2008-2011;
5. Universitas Hasanuddin Makassar, Program Sarjana Jurusan Akuntansi Tahun 2015-2016 (tugas belajar).

Riwayat Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2011-sekarang).